

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin.2007, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*.PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin., Dinar, S. A., & Fadillah, S. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Edi Sukarsno, 2002, *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firman Sujadi, 2014, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke 1, Bee Media Pustaka, Jakarta.
- Galang Taufani Dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris - Indonesia*, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pelihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Kathrina, Riris. 2014. *Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara*. P3DI, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2011. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Logemann, Diterjemahkan Oleh Makkatutu Dan Pangkerego Dari Judul Asli *Over De Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve*, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Modul 1: *Transparansi Dan Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*,2010, BEC-TF, Jakarta.

- Mohammad Hilman. *Manusia, Kekuasaan, Dan Etika* , 2007, Permata, Jakarta.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nico Adrianto, *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*, 2007, Bayumedia Publishing, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2003, Balai Pustaka, Jakarta.
- Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi , Evaluasi, Risk Managment Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate*, 2008 Metode Penelitian Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, 2004, Granit, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2014, UI-Press, Jakarta.
- Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban APBD (Berdasarkan Kinerja)*, 2005, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, 2011, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Surachmin Dan Cahaya, Suhandi. 2011. *Strategi Dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

C. Jurnal

Agus Zaini, *Peran KPK Dengan Kejaksaaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol. 9 No.1 (Februari, 2020), <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1591>

Artidjo Alkostar, 2013, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. Jurnal Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, Vol. 1 <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/365>

Dr.Muhammad Sawir,M.Si., 2017, *Papua Review Konsep Akuntabilitas Publik*, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1

Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani Dan Muhammad Junaidi, 2022, *Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara*, Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No.2 [KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA | Harmono | JURNAL USM LAW REVIEW](#)

Edah Jubaedah, Nugraha Lili, Dan Hariz Faozan, 2008, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bandung*,PKP2AILAN <https://litbang.bandung.lan.go.id/index.php?r=post/read&id=68>

Elih Dalilah, Vishnu Juwono, *Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & Mcconnell*, Jurnal Antikorupsi, Vol.7 No. 2 <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/861/155>

Gabriella,Debby Telly Antow,Herlyanty Yuliana A Bawole, *Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Administratum Vol.XI/No.04/Jun/2023 [JURNAL+HUKUM+GABRIELA. \(1\).pdf](#)

Herlambang Budi Prasetya,2013,*Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi* [AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK, SEBAGAI INSTRUMEN MENEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI | Budi Prasetya | Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan \(uns.ac.id\)](#)

Ingnuan, Y. V., & Lutfi, M. 2018. *Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)* [PELAKSANAAN PENINGKATAN KEPATUHAN PELAPORAN LAR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA \(LHKPN\) | Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen \(utmj.ac.id\)](#)

Jeane Bolang,2014, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik* *Application Of Accountability And Transparency In The Implementation Of Good Governance*, Lex Et Societatis, Vol. II/No. 9. [PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK APPLICATION OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE](#)

Jimly Asshiddiqie, *Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Disampaikan Dalam Rangka Konferensi Hukum Tata Negara Ke-2, Di UNAND, Padang, September 2015.

Juanda Nawawi, 2012, *Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1130>

M.Nasir Djamil, TB Massa Djafar, 2016, *Etika Publik Pejabat Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih*, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, VOL. 12 No. 01.
<http://repository.unas.ac.id/137/1/11.%20Drs%20T%20B%20MASSA%20DJAFAR%20Ph.D.pdf>

Mahardhika, V. 2021. *Strengthening LHKPN Prevention Of Illicit Enrichment In Efforts To Eradicate Corruption*. *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2 Issue 2. (PDF) STRENGTHENING LHKPN: PREVENTION OF ILLICIT ENRICHMENT IN EFFORTS TO ERADICATE CORRUPTION (researchgate.net)

Miracle M. A. A. S. Sihombing, 2012, *Laporan Kuliah Kerja Lapangan, Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Laporan KKL Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/212>

Moento, P., Firman, F., & Yusuf, A., 2019, *Good Governance Dalam Pemerintahan*. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2).
<https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>

Rizky Nur Cahyani, 2023, *Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Rafael Alun Trisambod*, Vol.2 No.1
<https://ejournal.unimugo.ac.id/HOMBIS/article/view/1066>

Simanjuntak, M. 2016. *Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.7. MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) / Simanjuntak | JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA (universitassuryadarma.ac.id)

Tobroni, F. 2020. *Asistensi Pengisian E-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan Dan Akuntabel*. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Asistensi Pengisian e-LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI (unnes.ac.id)

Winasya Pricilia Sumenge, 2019, *Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 12.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/27578>

Yehezkiel. 2023. *Overview Of State Organizers Wealth Report (LHKPN) As A Means Of Corruption Prevention*. International Journal Of Law, Toursim, And Culture, Vol.2 Issue 1. [Harvard International Law Journal | The oldest and most-cited student-edited journal of international law.](#)

D. Skripsi

Nur Lathiifah Andrianti, 2021, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, Skripsi Universitas Tidar (UNTIDAR), Magelang, Jawa Tengah.

Irvan Saputra, 2024, *Fenomena Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Sebagai Pintu Masuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Universitas Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara.

E. Tesis

Deprizon, 2015, *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, Tesis Universitas Andalas, Padang.

F. Website

Zamrotun Solichah, 2023, *Efektifkah Perpanjangan Masa Jabatan Kades Untuk Kemakmuran Rakyat*, <https://jatim.antaraneews.com/Berita/674265/Efektifkah-Perpanjangan-Masa-Jabatan-Kades-Untuk-Kemakmuran-Rakyat>.

SULISTYO, R. K. D. (2021). *Tak Ada Lagi Alasan Tidak Melaporkan LHKPN*. <https://www.kompas.id/Baca/Polhuk/2021/09/10/Tak-Ada-Lagi-Alasan-Tidak-Melaporkan-Lhkpn>

Joko Saputra. (2023). *Usai Dipecat, AKBP Achiruddin Juga Terlibat Kasus TPPU Dan Migas*. RRI.CO.ID. <https://www.rri.co.id/Kriminalitas/226396/Usai-Dipecat-Akbp-Achiruddin-Juga-Terlibat-Kasus-Tppu-Dan-Migas>

II, P. M. K. (N.D.). *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. http://www.pn.majalengka.go.id/html/Laporan_Harta_Kekayaan_Pejabat_Negara_Lkhpn.html

Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, P. R. (2019). *Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan PPAK*, https://www.ppatk.go.id/Siaran_Pers/Read/953/Memahami-Transaksi-Keuangan-Mencurigakan.html

DETIK, T. (2021). *Mencuat Lagi Cicak Vs Buaya Di Tubuh KPK, Begini Sejarahnya*, Detik.COM. [https://News.Detik.Com/Berita/D5561874/Mencuat-Lagi-Cicak-Vs Buaya-Di-Tubuh-Kpk-Begini-Sejarahnya](https://News.Detik.Com/Berita/D5561874/Mencuat-Lagi-Cicak-Vs-Buaya-Di-Tubuh-Kpk-Begini-Sejarahnya)

Elhkpn, *Pengertian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara*, Tersedia Di [E-Lhkpn \(Kpk.Go.Id\)](http://E-Lhkpn(Kpk.Go.Id)), Diakses Pada 9 Februari 2024. Jam 14.10 WIB

Mengenal LHKPN - Komisi Pemberantasan Korupsi, Www.Kpk.Go.Id.

Aplikasi LHKPN, Www.Kpk.Go.Id, Diakses Tanggal 3 Juni 2024 Pukul 00:20.

[Http://Www.Kpk.Go.Id/Id/Tentang-Kpk/Struktur-Organisasi/Deputi-Pencegahan](http://Www.Kpk.Go.Id/Id/Tentang-Kpk/Struktur-Organisasi/Deputi-Pencegahan),

